

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun suatu bangsa [1]. Dengan pendidikan yang berkualitas, suatu negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta daya saing global [2]. Di tingkat global, negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan Jepang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia [3]. Finlandia menerapkan pendidikan berbasis inovasi dan keseimbangan teori-praktik, sementara Singapura meningkatkan kualitasnya melalui seleksi guru yang ketat serta kurikulum berbasis sains dan teknologi dan Jepang juga berfokus pada kualitas guru, kurikulum berbasis keterampilan, serta dukungan infrastruktur yang memadai [3]. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan menghadapi kendala besar dalam hal akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta keterbatasan anggaran [4]. Rendahnya kualitas pendidikan di negara berkembang berdampak pada tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi [5].

Pendidikan memegang peranan penting di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya [6]. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sektor pendidikan. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 anggaran pendidikan mencapai Rp 612,2 triliun, yang setara dengan 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [7].

Anggaran ini digunakan untuk berbagai program seperti peningkatan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan penyediaan beasiswa [8].

Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat karena menyentuh aspek-aspek vital dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan laporan dari Kompas [9], adanya pemotongan anggaran signifikan sebesar 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,6 triliun atau setara dengan 25 persen pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas). Pemangkasan ini mencakup tunjangan dosen non-PNS, program bantuan sosial seperti beasiswa, program bantuan lembaga seperti BOPTN, serta layanan publik di perguruan tinggi. Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, menyayangkan pemotongan tersebut karena berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dan menekankan bahwa alokasi BOPTN saat ini saja belum mencukupi Biaya Kuliah Tunggal (BKT), sehingga pemangkasan justru berisiko mengurangi kualitas layanan pendidikan [9].

Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, opini publik terhadap kebijakan pemerintah semakin mudah diakses. Media sosial menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyampaikan opini mereka secara *real-time* mengenai berbagai isu dan kebijakan [10], termasuk kebijakan anggaran pendidikan. Platform seperti X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) merupakan salah satu media sosial yang cukup populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia [11]. Menurut laporan Data Reportal, jumlah pengguna aktif X di Indonesia pada bulan Januari tahun 2024 mencapai 24,69 juta [12]. Angka ini menjadikan X sebagai platform media sosial peringkat keenam yang sering digunakan di Indonesia. Sebagai platform *mikroblogging*, X menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk membagikan pemikiran, opini, dan informasi melalui format pesan singkat yang disebut *post* [13]. Rata-rata, terdapat lebih dari 500 juta *post* yang diunggah setiap

hari secara global, atau sekitar 6.000 *post* setiap detik [14]. Dengan tingginya aktivitas pengguna di X, platform ini menjadi sumber data yang kaya untuk memahami opini masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.

Tingginya perhatian publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan sehingga diperlukan penelitian untuk memahami opini publik mengenai kebijakan tersebut. Analisis sentimen menjadi pendekatan yang efektif dalam mengolah dan mengklasifikasikan opini publik. Analisis sentimen telah banyak digunakan di sektor bisnis untuk menggali opini konsumen terhadap produk dan layanan, menggantikan metode tradisional seperti kuesioner. Hal ini menunjukkan potensi besar analisis sentimen dalam menangkap opini publik secara luas [15].

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dengan berbagai opini yang berkembang di media sosial, kurangnya pemetaan sentimen yang jelas menyulitkan pemahaman menyeluruh terkait persepsi publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana cara menganalisis opini masyarakat tentang kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang diungkapkan melalui *post* di platform X?

1.4. Batasan Masalah

Batasan Masalah pada penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

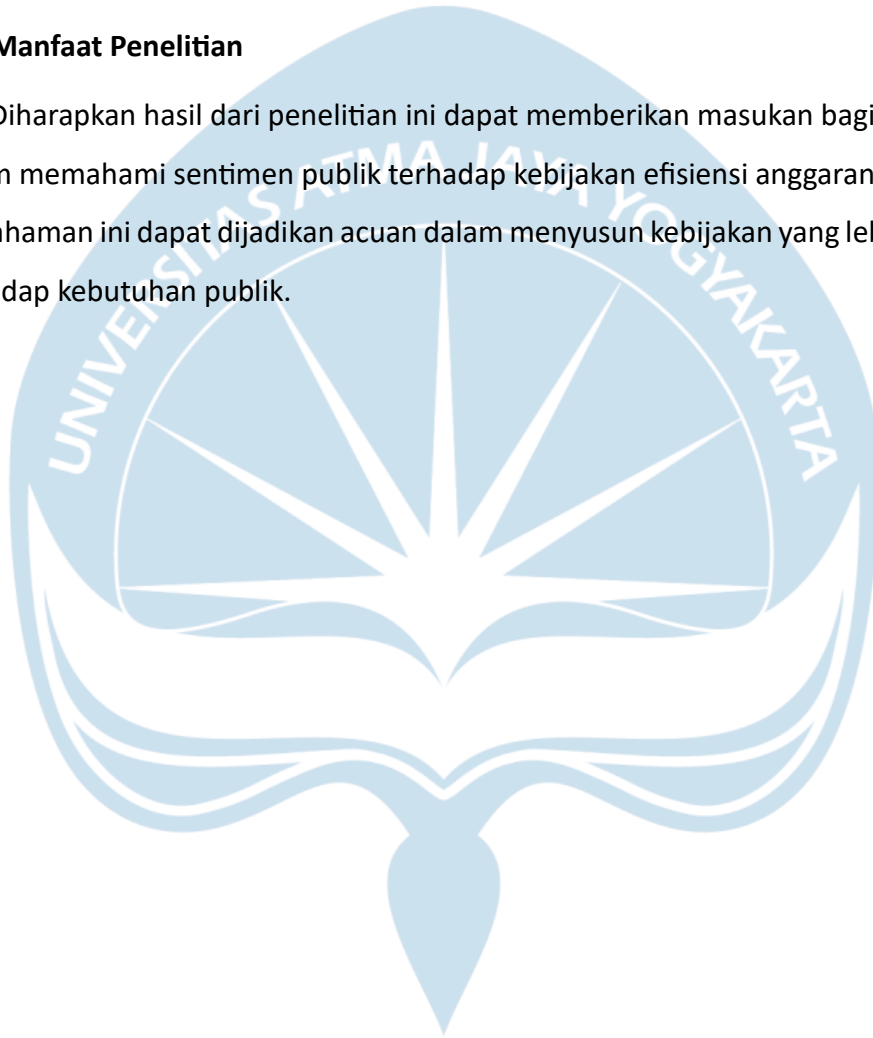
1. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari data *post* yang menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Data diambil dari platform X

1.5. Tujuan Penelitian

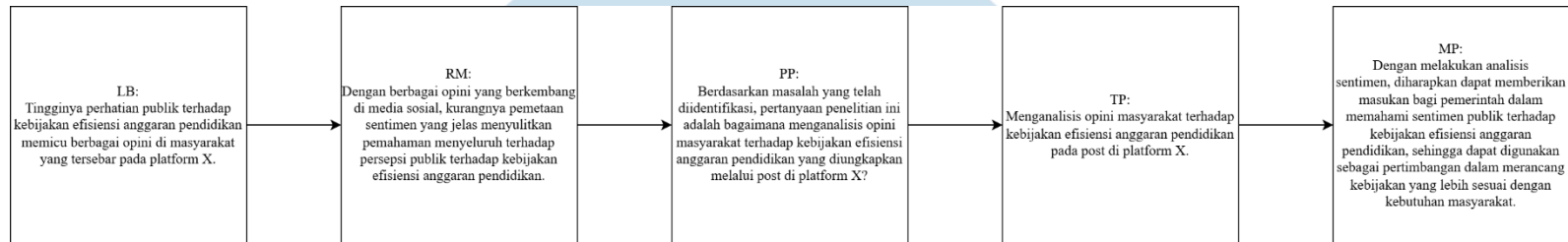
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis opini masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan pada *post* di platform X.

1.6. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memahami sentimen publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Pemahaman ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.



1.7. Bagan Keterkaitan



Gambar 1. 1. Bagan Keterkaitan